



Postingan

bkad_provinsijambi



bkad_provinsijambi

Konten AI





BKAD

Provinsi Jambi

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAMBI

*Transparansi
Akuntabilitas
Profesional*



PROGRAM STRATEGIS PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan serta telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yaitu :

A. PROGRAM

1. Pengelolaan keuangan daerah
2. Pengelolaan barang milik daerah



B. KEGIATAN

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
7. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah.



C. SUB KEGIATAN

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
5. Koordinasi Perencanaan Anggaran: Belanja Daerah.
6. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
7. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
8. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
9. Analisis Perencanaan dan Penyusunan Rambu-rambu Keuangan.
10. Pengelolaan Dana Darurat.
11. Pengelolaan Dana bagi H.
12. Koordinasi dan Pengelolaan Sisa Lebih.
13. Pelaksanaan, Pelaksanaan Pembiayaan.
14. Pelaksanaan Pembiayaan, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.



18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyelesaian PPK.
19. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
20. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
21. Penyusunan Perunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
22. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
24. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
25. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
26. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Fundaport-LO, dan Beban.
27. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
28. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah.
29. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
30. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
31. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelidikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Korupsi Daerah.
32. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
33. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
34. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.



11



Disukai oleh rhhmma_ dan lainnya

bkad_provinsijambi program strategis

6 menit yang lalu



bkad_provinsijambi

